

PENGUASAAN LAHAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PETANI (Kasus Sub DAS Temon dan Keduang)

*(Land Authority and Farmers Income distribution; A Case Study at Temon
and Keduang Sub Watershed)*

Oleh:

S. Andy Cahyono, Nana Haryanti,

Nunung Puji Nugroho, dan Sunaryo

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai Indonesia Bagian Barat di Surakarta (BP2TP DAS IBB Surakarta)

Jl. Jendral A. Yani Pabelan, Kartasura PO BOX 295 Surakarta 57102

ABSTRACT

Land authority and imbalance of income distribution are always be an interesting issue for an importance role of land in society. It is interesting and necessary to find out how contribution of agricultural sector to farmer income and what effect of land authority imbalance to income distribution.

This research was conducted at Temon and Keduang sub watershed. Survey method was adopted to collect the field data. Afterward, the collected data was analyzed quantitatively.

The results indicated that the contribution of agricultural sector to farmer income at Temon sub watershed (69.39%) was higher than at Keduang sub watershed (59.11%). This showed that narrow in land authority will be increasing the contribution of agricultural sector to total income. It related to diversify efforts of land using. Imbalance of land authority not always affected the income imbalance, caused by development of non agricultural sector. Land access only was unfeasible to be an indicator of farmers household income level without considering the biophysics condition and non agricultural sector growth development.

Key words: land authority, income distribution, imbalance, watershed

PENDAHULUAN

Kemiskinan pedesaan merupakan isu utama dalam pembangunan Nasional Indonesia. Selain isu kemiskinan, distribusi pendapatan merupakan salah satu isu yang mengemuka disebabkan persoalan tersebut merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan (Cahyono, 1999). Sejarah politik pembangunan menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi

pendapatan yang berpangkal pada ketimpangan distribusi penguasaan lahan akan berakibat pada kecemburuan sosial yang berujung pada keresahan masyarakat dengan akibat terburuk terjadinya revolusi sosial yang berupa perlawanan rakyat.

Masyarakat pedesaan pada umumnya berada pada posisi ekonomi yang lemah dimana tingkat pendidikan,

keterampilan, modal, dan lahan yang dimiliki, belum dapat menunjang kegiatannya untuk memperbesar pendapatan. Modal utama masyarakat pedesaan adalah lahan pertanian, tetapi dari indikator distribusi dan penguasaan lahan (kepemilikan dan garapan) dapat diduga bahwa sumberdaya lahan yang tersedia terbatas dan lahan pertanian pada umumnya sempit.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja di pedesaan dan tekanan penduduk terhadap lahan yang diikuti dengan luas lahan yang semakin menyusut (Nasucha, 1994) akan mengakibatkan rata-rata luas kepemilikan dan garapan lahan di Jawa semakin sempit. Hernanto (1994) menyatakan bahwa luas lahan usahatani akan menentukan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan rumah tangga. Sehingga luas lahan akan mempengaruhi pendapatan yang diterima petani karena pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama bagi petani.

Pada dekade 70-an dan awal 80-an beberapa studi menyatakan bahwa kesenjangan pada distribusi pendapatan merupakan akibat dari distribusi penguasaan lahan yang timpang setelah masuknya teknologi baru (Siahaan, 1977; Sinaga dan White, 1978; Soentoro, 1981). Studi selanjutnya ternyata mempertanyakan kesahihan penelitian tersebut. Manning (1988) dan Schrevel (1989) menyatakan bahwa distribusi lahan yang timpang tidak mengakibatkan distribusi

pendapatan yang timpang pula. Hal ini disebabkan semakin dominannya peranan sektor non pertanian dalam memberikan kontribusi pendapatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) besarnya pendapatan petani di dua Sub DAS, (2) kontribusi pendapatan dari sektor non pertanian, (3) distribusi penguasaan lahan dan pendapatan petani, dan (4) dampak ketimpangan penguasaan lahan terhadap distribusi pendapatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada 8 desa yang tercakup dalam 5 kecamatan (lihat Tabel 1) pada dua Sub DAS yaitu (Temon dan Keduang). Sub DAS Temon dan Keduang dipilih karena memiliki karakteristik biofisik yang berbeda. Sub DAS Keduang dengan luas 42.644 ha memiliki tingkat erosi sebesar 97,3 ton/ha/th dan Sub DAS Temon dengan luas 6.953 ha memiliki tingkat erosi sebesar 5 ton/ha/th (BTP DAS Surakarta, 1995).

Pengambilan sampel dilakukan secara *simple random sampling* pada 8 desa di Sub DAS Temon dan Keduang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan kuisioner yang telah disiapkan pada 141 responden. Responden yang berasal dari Sub DAS Temon sebanyak 37 responden dan yang berasal dari Sub DAS Keduang sebanyak 104 responden.

Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan dianalisis secara kuantitatif. Pendapatan merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan bersih dihitung dengan formula (Departemen Kehutanan, 1996; Rahmat, 1995):

$$P_b = \sum_{i=1}^n (P_i - C_i)$$

Dimana:

- P_b = Jumlah Pendapatan bersih (Rp)
- P_i = Pendapatan kotor ke i (Rp)
- C_i = Biaya ke i (Rp)

Untuk menjawab tujuan penelitian kedua dipergunakan pangsa pendapatan dari sektor non pertanian terhadap pendapatan total. Simatupang (1988) menyatakan bahwa pemisahan pendapatan dari pertanian dan non pertanian bermanfaat untuk melihat ketergantungan rumah tangga terhadap masing-masing kegiatan.

Untuk menghitung ketimpangan distribusi pendapatan dan penguasaan lahan, maka dipergunakan koefisien Gini yang diformulasikan sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1})$$

Dimana:

- KG = Koefisien Gini
- X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas ke i

- Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas ke i
- i = Jika dibagi dalam lima kelas, maka menjadi 20% termiskin, 20% kedua, 20% ketiga, 20% keempat dan 20% terkaya

Menurut kriteria Departemen Kehutanan (1996) apabila angka Gini kurang dari 0,4, maka ketimpangan rendah, apabila angka Gini 0,4—0,5, maka ketimpangan moderat dan apabila angka Gini lebih dari 0,5, maka ketimpangan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Fisik dan Sosial

Secara biofisik, karakteristik Sub DAS Temon dan Keduang berbeda (lihat Tabel 1) yang akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat pada kedua Sub DAS tersebut. Desa di Sub DAS Temon pada umumnya terletak pada elevasi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan desa di sub DAS Keduang. Sementara itu, kondisi tanah pada Sub DAS Keduang lebih subur (dengan solum lebih tebal) bila dibandingkan dengan daerah pada Sub DAS Temon.

Kondisi biofisik yang berbeda akan berdampak pada karakteristik sosial ekonomi yang berbeda pula. Kepadatan penduduk di Desa yang termasuk dalam Sub DAS Keduang lebih tinggi bila dibandingkan dengan desa di Sub DAS

Tabel 1. Karakteristik Fisik dan Sosial Ekonomi Desa-Desa Sampel Penelitian

Sub DAS	Temon			Keduang					
	Selopuro	Tegin	Batuwarno	Gemawang	Sanggrong	Duren	Kebonagung	Sambitejo	Jatiriono
Desa	Batuwarno	Batuwarno	Batuwarno	Ngadirojo	Jatiroto	Jatiroto	Sidoarjo	Jatiriono	Jatiriono
Kecamatan									
Jarak dari Kecamatan	2,0	2,0	2,0	10,0	2,5	2,5	6,0	3,0	0,5
(km)									
Luas (ha)	708	996	996	1.144	253	307	383	281	215
Curah Hujan (mm/th)	2.238	2.238	2.238	2.291	2.743	2.743	2.347	1.551	1.551
Jumlah Penduduk (jwa)	1.674	1.987	1.987	4.631	1.823	2.242	3.085	3.795	4.236
Kepadatan penduduk (jwa/ha)	2,36	1,99	1,99	4,05	7,20	7,30	8,05	13,51	19,70
Pertumbuhan Penduduk (%/th)	1,14	0,18	0,18	0,40	0,04	0,02	0,50	0,34	0,43
Sex ratio (%)	103,6	97,6	97,6	104,1	108,1	97,4	94,4	97,1	99,4
Elevasi (m)	292	292	292	378	451	451	490	401	401
Topografi	Pegunungan berbatu gamping	Pegunungan berbatu gamping	Pegunungan berbatu gamping	Pegunungan datar	Pegunungan berbatu	Pegunungan berbatu	dataran	Dataran tinggi	Dataran tinggi

Sumber: Kantor Statistik Wonogiri, 2001

Tabel 2. Rata-Rata Usia Petani Berdasarkan Luas Penguasaan Lahan

Sub DAS	Kelas Penguasaan Lahan (m ²)	Jumlah Petani	Usia Petani (Tahun)
Temon	<4.900	22	46,05
	5.000-9.900	11	49,45
	>10.000	4	50,75
Keduang	<4.900	79	54,66
	5.000-9.900	23	55,70
	>10.000	2	38,50
Rerata Temon			47,57
RerataKeduang			54,58

Temon. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat pada kedua Sub DAS.

pengambilan keputusan dalam penggunaan lahan akan sangat ditentukan oleh persepsi petani terhadap resiko. Pada

Tabel 3. Komposisi Penguasaan Lahan untuk Penggunaan Pertanian

Sub DAS	Kelas Penguasaan Lahan (m ²)	Jumlah Petani	Penggunaan Lahan (%)				Total Lahan (m ²)	(%)
			Sawah	Tegal	Pekarangan	Hutan		
Temon	<4.900	22	20,07	19,86	30,35	29,71	63.270	36,86
	5.000-9.900	11	16,35	38,94	36,92	7,79	64.200	37,39
	>10.000	4	0,00	90,49	4,97	4,52	44.200	25,75
Total		37					171.670	100,00
Keduang	<4.900	79	19,19	38,16	35,12	7,53	249.830	60,15
	5.000-9.900	23	14,58	52,18	21,63	11,60	140.950	36,86
	>10.000	2	43,13	45,09	11,76	0,00	25.500	2,99
Total		104					416.280	100,00

Karakteristik Usia Responden

Penguasaan lahan petani di bagi dalam 3 kelas, yaitu sempit (<4.900 m²), sedang (5.000—9.900 m²), dan luas (>10.000 m²). Sebagian besar petani (59,45% di Sub DAS Temon dan 75,96% di Sub DAS Keduang) memiliki luas penguasaan lahan kurang dari 4.900 m². Sempitnya luas penguasaan lahan akan mempengaruhi pendapatan usahatani yang berasal dari lahan dan pola tanam yang akan diusahakan. Selain itu,

umumnya petani kecil cenderung menghindari resiko (*risk aversion*), apalagi mengingat sebagian besar petani berusia relatif tua. Karakteristik usia responden disajikan pada Tabel 2.

Penguasaan Lahan

Penguasaan lahan akan sangat menentukan status sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Pada masyarakat desa lahan merupakan salah satu simbol yang akan menentukan keberadaan

seseorang di masyarakat. Komposisi penguasaan lahan di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 3.

Petani berlahan sempit ($< 4.900 \text{ m}^2$) di Sub DAS Temon menguasai lahan sebesar 63.270 m^2 atau $36,86\%$ luas lahan, sedangkan di Sub DAS Keduang petani berlahan sempit menguasai 249.830 m^2 atau $60,15\%$ luas lahan. Petani berlahan luas di Sub DAS Temon yang berjumlah 4 orang menguasai 44.200 m^2 atau $25,75\%$, sedangkan di Sub DAS Keduang petani berlahan luas yang berjumlah 2 orang menguasai 25.500 m^2 atau $2,99\%$ luas lahan. Terlihat bahwa petani berlahan sempit yang berjumlah banyak menguasai lahan yang relatif kecil.

Kondisi tanah di Sub DAS Temon yang relatif kurang subur membuat petani berlahan sempit lebih mendayagunakan lahannya untuk berbagai penggunaan. Selain itu, lahan yang tidak

dapat dikembangkan untuk tanaman pangan atau palawija dikembangkan sebagai hutan rakyat. Pada sub DAS Temon hampir sepertiga tanah yang dimiliki oleh petani berlahan sempit dipergunakan untuk pengembangan hutan rakyat, sedangkan di Sub DAS Keduang yang relatif lebih subur, pengembangan hutan rakyatnya relatif kurang bagus.

Petani berlahan sedang cenderung mendayagunakan tanahnya untuk tanaman pangan, seperti tegal dan pekarangan. Tegal dan pekarangan tersebut terutama ditanami jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan tanaman pangan lainnya. Adapun petani berlahan luas cenderung tidak lagi berupaya untuk hidup subsisten dan mendiversifikasi penggunaan lahannya. Petani berlahan luas mulai mengusahakan lahannya pada usahatani yang mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi. Pada daerah di Sub DAS Temon, sebagian besar petani berlahan luas

Tabel 4. Rata-Rata Penggunaan Lahan Berdasarkan Penguasaan Lahan

Sub DAS	Kelas Penguasaan Lahan (m^2)	Jumlah Petani	Penggunaan Lahan (m^2)				
			Sawah	Tegal	Pekarangan	Hutan	Total
Temon	<4.900	22	2.540,00	2.095,00	1.371,43	1.880,00	2.875,91
	5.000-9.900	11	3.500,00	5.000,00	2.633,33	2.500,00	5.836,36
	>10.000	4	0,00	10.000,00	733,33	2.000,00	11.050,00
Keduang	<4.900	79	1.997,08	2.444,87	1.438,52	2.350,00	3.162,41
	5.000-9.900	23	2.935,71	4.086,11	1.694,44	3.270,00	6.128,26
	>10.000	2	5.500,00	5.750,00	1.500,00	0,00	12.750,00
Rataan Temon			2.900,00	5.171,33	1.734,62	1.984,62	4.639,73
Rataan Keduang			2.408,48	3.057,63	1.496,91	2.703,85	4.002,69

mempergunakan lahannya untuk tegal. Adapun di Sub DAS Keduang sebagian besar petani berlahan luas mempergunakan lahannya untuk sawah dan tegal. Hal ini berkaitan dengan kondisi tanah di Keduang yang lebih subur, sehingga mampu diusahakan untuk sawah, adapun lahan di Temon yang relatif kurang subur hanya dapat dipergunakan sebagai tegal.

Secara umum rata-rata penggunaan lahan berdasarkan penguasaan lahan per petani di Temon lebih besar dibandingkan dengan petani di Keduang. Kondisi ini disebabkan oleh lebih kecilnya tekanan penduduk terhadap lahan di Temon bila dibandingkan dengan di Keduang (lihat Tabel 4).

Kontribusi Pertanian dan Non Pertanian

Perbedaan dalam luas penguasaan lahan akan berdampak pada perbedaan pendapatan yang diperoleh. Secara umum, semakin luas penguasaan lahan, maka akan semakin besar

pendapatan dari usahatani yang diperoleh. Namun, hal tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kesuburan tanah serta tingkat teknologi yang diterapkan. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha tani ini kemudian diinvestasikan pada sektor di luar usahatani. Sehingga ada kecenderungan bahwa semakin luas lahan yang dikuasai, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh. Tetapi temuan tersebut tidak selamanya benar, karena beberapa bukti menunjukkan bahwa semakin luas penguasaan lahan tidak selamanya pendapatan petani akan besar. Hal tersebut dikarenakan semakin dominannya pendapatan yang berasal dari luar usahatani. Kontribusi pendapatan petani yang berasal dari pertanian dan non pertanian berdasarkan luas penguasaan lahan ditunjukkan pada Tabel 5.

Pendapatan rata-rata petani di Sub DAS Temon bila dikonversi ke hektar, maka mencapai Rp7.170.650/ha dan di Sub DAS Keduang mencapai

Tabel 5. Kontribusi Pertanian dan Non Pertanian terhadap Pendapatan Keluarga Berdasarkan Penguasaan Lahan

Sub DAS	Kelas Penguasaan Lahan (m ²)	Jumlah Petani	Total Pendapatan	Kontribusi (%)	
				Pertanian	Non Pertanian
Temon	<4.900	22	2.973.375,00	76,40	23,60
	5.000-9.900	11	3.250.745,45	71,89	28,11
	>10.000	4	5.481.550,00	23,01	76,99
Keduang	<4.900	79	4.090.872,53	59,96	40,04
	5.000-9.900	23	2.712.839,13	54,05	45,95
	>10.000	2	2.692.275,00	84,09	15,91
Rataan Temon			3.326.990,54	69,29	30,71
Rataan Keduang			3.759.219,04	59,11	40,89

Rp9.391.700/ha. Pendapatan petani di Sub DAS Keduang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan petani di Sub DAS Temon. Hal ini karena solum tanah di Sub DAS Keduang lebih tebal di dibandingkan dengan Sub DAS Temon. Sehingga akan mempengaruhi besarnya pendapatan dari sekkor pertanian, dimana petani di sub DAS Keduang, yang bersolum tebal, akan memperoleh pendapatan lebih besar bila dibandingkan dengan petani di sub DAS Temon yang bersolum tipis.

Kontribusi pendapatan dari pertanian di Sub DAS Temon mencapai 69,29%, sedangkan di Sub DAS Keduang mencapai 59,11 %. Tingginya kontribusi pendapatan dari pertanian di Temon lebih disebabkan oleh belum berkembangnya usaha di luar pertanian. Akibatnya, kontribusi pendapatan non pertanian masih relatif kecil dibandingkan dengan Sub DAS Keduang.

Pada Sub DAS Temon, kontribusi pertanian terhadap pendapatan petani akan semakin besar seiring dengan sempitnya lahan yang dikuasai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanian masih sangat menentukan bagi kehidupan petani kecil di Sub DAS Temon. Meskipun demikian, surplus yang diperoleh dari pertanian tersebut belum mampu meningkatkan kontribusi sektor non pertanian. Hal ini dikarenakan (1) pendapatan dari sektor pertanian hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehingga belum dapat diinvestasikan pada sektor non pertanian. Kondisi ini terjadi karena produktivitas yang rendah sebagai akibat kondisi biofisik yang kurang subur. (2) Tidak berkembangnya sektor non pertanian, kecuali bagi petani berlahan luas. Petani ini umumnya merupakan tokoh masyarakat, elit desa, dan aparat pemerintah. Dengan semakin berkembangnya usaha non pertanian pada petani berlahan luas, maka kontribusi dari sektor pertanian akan semakin menurun. Secara keseluruhan, pendapatan total petani berlahan luas relatif besar dengan dominasi dari sektor non pertanian (mencapai 76,99 % pada petani luas).

Pada Sub DAS Keduang, semakin luas lahan, maka semakin besar kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan keluarga. Pada petani luas, kontribusi pendapatan dari pertanian mencapai 84,09% dari pendapatan total petani. Sumbangan pertanian pada petani kecil pun masih relatif besar mencapai 59,96% dari pendapatan total petani. Tingginya sumbangan pendapatan dari pertanian ini disebabkan oleh kondisi biofisik di Sub DAS Keduang yang lebih subur. Kondisi biofisik yang subur membuat petani mengakumulasi kekayaan dalam bentuk lahan.

Anggapan bahwa semakin luas lahan yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan pendapatan dari kerja di luar usahatani tidak selamanya

Tabel 6. Indeks Gini Penguasaan Lahan dan Distribusi Pendapatan Petani di Sub DAS Temon dan Keduang

Sub DAS	Total lahan	Pendapatan				
		Lahan	Non Lahan	Pertanian	Luar Pertanian	Total
Temon	0,33	0,69	0,68	0,56	0,76	0,60
Keduang	0,24	0,55	0,74	0,52	0,72	0,49

benar (Hermawan dan Setiani, 1991). Secara umum usaha di luar pertanian dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu usaha yang memerlukan modal (berdagang, industri rumah tangga, dan lain-lain) dan usaha yang tidak membutuhkan modal (buruh, jasa, dan lain-lain) (Mintoro, 1983).

Bila dicermati dari kedua Sub DAS, maka baik petani pada daerah dengan kondisi subur maupun kurang subur dan luas kepemilikan lahan yang berbeda, ternyata mengembangkan kegiatan lain untuk meningkatkan pendapatan, baik dari pertanian maupun non pertanian. Namun, respon dan besarnya kontribusi berbeda-beda. Pada daerah dengan kondisi biofisik kurang subur, maka kontribusi pertanian akan semakin besar pada petani berlahan sempit. Sebaliknya pada daerah yang subur, maka sumbangan dari pertanian relatif besar pada petani berlahan luas.

Akses terhadap tanah tidak lagi memadai untuk dijadikan indikator tingkat pendapatan rumah tangga petani di pedesaan (Schrevel, 1989). Oleh karena itu, perlu diperhatikan pula indikator lain yang berpengaruh seperti

kondisi biofisik dan perkembangan usaha non pertanian.

Distribusi Pendapatan

Kesenjangan dalam pemilikan lahan dan pendapatan dapat diketahui dengan menghitung indeks Gini. Tabel 6 menyajikan kesenjangan penguasaan lahan dan pendapatan petani di Sub DAS Temon dan Keduang. Selain itu, Tabel 6 menyajikan pula indeks Gini untuk pendapatan yang berasal dari lahan, non lahan, pertanian, dan non pertanian. Dengan diketahui besarnya indeks Gini, maka akan diketahui pada sumber pendapatan mana kesenjangan itu terjadi.

Pada Tabel 6, berdasarkan nilai Gini dapat diketahui bahwa total kepemilikan lahan relatif merata antara petani berlahan sempit dan luas, baik di Sub DAS Temon maupun Keduang. Nilai Gini yang kurang dari 0,4 menunjukkan bahwa ketimpangan kepemilikan lahan di kedua Sub DAS adalah rendah. Koefisien Gini untuk pendapatan total petani di Sub DAS Temon lebih besar dari 0,5 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan petani di daerah tersebut termasuk tinggi. Sedangkan di Sub DAS Keduang

memiliki ketimpangan pendapatan moderat yang ditunjukkan dengan indeks Gini antara 0,4— 0,5.

Adanya ketimpangan pendapatan petani tersebut bukan disebabkan oleh ketimpangan penguasaan lahan, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan produktivitas lahan dan berkembangnya kegiatan non pertanian. Masuknya teknologi pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas lahan merupakan salah satu sumber ketimpangan pendapatan karena petani berlahan luas cenderung lebih dapat mengakses teknologi. Akibatnya, produktivitas lahan mereka meningkat dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan. Petani berlahan luas cenderung lebih cepat dibandingkan petani berlahan sempit. Pada akhirnya, adanya perbedaan laju peningkatan pendapatan yang signifikan tersebut berdampak pada terjadinya ketimpangan pendapatan. Apabila ketimpangan pendapatan ini disertai dengan perbaikan mobilitas dan peningkatan kesempatan kerja di luar pertanian bagi petani berlahan sempit, maka distribusi pendapatan tidak akan terlalu timpang (Kasryno, 1984).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pendapatan petani di Sub DAS Temon sebesar Rp7.170.650/ha lebih rendah bila dibandingkan dengan di Sub DAS Keduang yang mencapai Rp9.391.700/ha. Hal ini

disebabkan oleh kondisi biofisik di Sub DAS Temon yang kurang sesuai untuk pertanian.

2. Kontribusi pendapatan sektor pertanian terhadap pendapatan total di Sub DAS Temon mencapai 69,29%, sedangkan di Keduang mencapai 59,11%. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin sempit lahan, maka kontribusi pertanian semakin besar, sebaliknya di Sub DAS keduang. Hal ini terkait dengan adanya diversifikasi pendapatan ke non pertanian.
3. Ketimpangan kepemilikan lahan di Sub DAS Temon dan Keduang tergolong rendah. Ketimpangan pendapatan di Sub DAS Temon tergolong tinggi dan di Keduang tergolong sedang. Kegiatan di luar pertanian merupakan salah satu sumber ketimpangan pendapatan petani.
4. Ketimpangan penguasaan lahan tidak selamanya berdampak pada timpangnya distribusi pendapatan karena semakin dominannya peranan sektor non pertanian.
5. Akses terhadap tanah semata tidak lagi memadai untuk dijadikan indikator tingkat pendapatan rumah tangga petani tanpa memperhatikan kondisi biofisik dan perkembangan usaha non pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- BTP DAS Surakarta. 1995. *Laporan Evaluasi Pengelolaan DAS Wonogiri*. Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Surakarta. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan. Surakarta.
- Cahyono, A. 1999. Penguasaan Lahan dan Distribusi Pendapatan Petani di Indonesia. *Tesis* : Program Studi Ekonomi Pertanian, Program Paska Sarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Departemen Kehutanan. 1996. Pedoman Survey Sosial Ekonomi Kehutanan Indonesia (PSSEKI) Buku II: *Petunjuk Teknis*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta
- Hermawan, A dan C. Setiati. 1991. *Hubungan Beberapa Faktor Rumah Tangga Petani dengan Kegiatan di Luar Usaha tani: Suatu Alternatif Pemecahan Masalah*. *Risalah Seminar Hasil Penelitian Pertanian Lahan Kering dan Konservasi Tanah di Kabupaten Semarang dan Boyolali*. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian. Departemen Pertanian.
- Hernanto, F. 1994. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Kasryno, F. 1984. *Kerangka Analisa Ekonomi Pembangunan Pedesaan*. Dalam Kasryno (editor), *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Manning. 1988. Penyerapan Tenaga Kerja di Pedesaan Jawa. *Prisma*. Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Penerangan Ekonomi. Jakarta.
- Mintoro, A. 1983. *Distribusi Pendapatan dalam Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Kasryno, F. eds. 1984. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Nasucha, C. 1994. Politik Ekonomi Pertanahan Indonesia. *Harian Republika*, Senin 31 Oktober 1994.
- Rachmat, M. 1995. *Metoda Analisa Usahatani*. Pelatihan Metoda Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan Pendekatan Agribisnis. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Schrevel, A. 1989. Akses Tanah Sebagai Indikator Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan: Kasus Daerah Ciduwian, Jawa Barat. *Prisma*, 18 (4): 38—51.
- Samatupang, P. 1988. *Metoda Analisa Ekonomi Produksi, Konsumsi, Pendapatan, dan Alokasi Tenaga Kerja Keluarga Petani*. *Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang*. Pusat Penelitian Agro Ekonomika. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Soentoro, 1981. *Pengaruh Penguasaan Tanah Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi di Pedesaan*. Survey Agro Ekonomika. Departemen Pertanian. Bogor.